

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme*, dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kehidupan Bangsa, dalam Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017), 96.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, (Bandung: Sinar Grafika Offset, 2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Bammelen, J.M. Van. *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus* (Jakarta: Bina Cipta, 1986)
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 19-20.
- DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, (Jakarta: CV. Net Communication, 2015), 178.
- Indar. *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014).
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Manju, 1989).
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).
- Norris, Pippa dan Alessandro Nai, *Election Watchdogs : Transparency, Accountability and Integrity*, (New York: Oxford University Press, 2017).
- Nurdin, Ismail and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia).

- Prasetyo, Teguh, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Priel, Dan, "*Law as a Social Construction and Conceptual Legal Theory*", (Toronto: Osgoode Hall Law School, York University, 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Shidarta, *Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Bangsa, dalam Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017).
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996).
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005
- Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: Penerbit Rajawali Press, 2018).
- Yuhermarmansyah, Edi. *Modul Mata Kuliah Hukum Pidana*, (Banda Aceh : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2024): 12.

Jurnal Ilmiah

- Alfarras, Muhammad Bintang. "Kedudukan Etika, Moral dan Hukum", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (November 2023).
- Anisa, Kharisma. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Komisi Negara", *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (Juni 2021).
- Arbie, Ardiansya, Toar Nerman Palilingan, dan Harly Stanly Muaja. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Asas Erga Omnes”, *Jurnal Lex Privatum* 13, No. 1 (2024).

Arifatuzzahrah, Firda dan Irham Bashori Hasba, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal USM Law Review* 7, No. 1 (2024)

David, Susanto Jonathan. “Implikasi Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Dari Perspektif Hukum Tata Negara”, *Journal Lex Privatum* 15, no. 1 (31 Januari 2025): 4

Disantara, Fradhana Putra. “Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum”, *Jurnal Litigasi* 22 (Oktober 2021): 214. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>

Farhan, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Universitas Mataram* (2021).

Fitania, Silvia Eka dan A.A. Ngurah Wirasila, “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan”, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018).

Ismail dan Hapsoro, Fakhris Lutfianto. “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 37, no . 2 (Desember 2021). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312>

Jessica dan R. Rahaditya, “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim”, *Unes Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 10602

Kurniawan, Itok Dwi. “Expansion The Meaning Of Principle Lex Specialis Derogat Lex Generalis Itok”, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, no. 6 (2023): 11. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.141>

Muhammad, “Peran Kelembagaan Etik DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Demokrati”, *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (November 2020). <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.239>

Nurdin, Maharani. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan,” *Jurnal Veritas Program*

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah
5, no. 2 (2019): 170, <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483>

Pintor, Rafael Lopez. "Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework," dalam IFES, *Electoral Fraud White Paper Series*, (Desember 2010).

Risnain, Muh. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman DI Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 1 (1 Maret 2014): 52

Teguh Prasetyo, dikutip kembali oleh Rosnawati. "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan* 4, no. 1 (Juni 2022).
<http://dx.doi.org/10.55108/jbk.v4i1.104>

Rosadi, Imron dan Adhitya Widya Kartka, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)", *Journal Presumption Of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka* 6, no. 2 (2 Oktober 2024): 163,
<https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.9131>

Rosnawati. "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Volume 4, no. 1, (Juni 2022).
<https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.104>

Sekartadi, Lalu Kukuh. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/Dkpp-Pke-Ii/2013), *Jurnal IUS* 3, no. 8 (Agustus, 2015): 404

Surajiyo. "Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis." *Jurnal Humaniora*, Vol. 12, no. 2, 2000.
<https://doi.org/10.22146/jh.685>

Syaefudin, Muhammad dan Kadi Sukarna. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum", *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 115.

Wowiling, Gabriela (et.al), "Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP," *Lex Crimen*, Vol. 10, no. 2, 2021

Dokumen Akademik

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menetri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011*

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kehidupan Bangsa, dalam Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Makalah/Skripsi/Tesis

Arnoldus Yansen, “Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpu Tapanuli Tengah)”, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9031>

Ida Budhiati, “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro
<https://repository.ubharajaya.ac.id/14076/1/%5BDisertasi%5D%20Dr.%20Ida%20Budhiati%20-%20REKONSTRUKSI%20POLITIK%20HUKUM%20PENYELENGGARA%20PEMILU%20DI%20INDONESIA.pdf>

Muhammad Rifqi Lidzikirrofifi, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Soreang Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin”, (UIN Sunan Gunungdjati Bandung, 2024), 3,
https://digilib.uinsgd.ac.id/98259/4/4_bab1.pdf

Nusrul Huda, “Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 33-Pke-Dkpp/Iii/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019).
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16277>

Wulan Basuki, “Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dalam memutus perkara pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (studi penelitian putusan DKPP No.317-PKE-DKPP/X/2019 tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Sebagai Komisioner KPU), (Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2021).
https://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/0000000000000000104782/0

Laman Internet

Ali Ridho, Lelang Bersifat Lex Specialis,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html>, diakses pada 27 Februari 2024

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “susila”, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/susila>, diakses pada 17 Mei 2025

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “langgar”, KBBI Online, <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses pada 15 Mei 2025

Heady Lugito dalam kegiatan *Rapat Penyampaian Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2024*, disampaikan pada 13 Desember 2024 di Yogyakarta, <https://www.tempo.co/politik/dkpp-manipulasi->

[suara-hingga-suap-jadi-penyebab-pemecatan-66-penyelenggara-pemilu-1181366](#)

Renata Christha Auli, Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/>, diakses pada 26 Januari 2024

Sejarah DKPP”, *DKPP RI*, <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/> , diakses pada 20 Maret 2025

“Keputusan Administratif Lembaga Yang Menindaklanjuti Putusan DKPP Dapat Dijadikan Obyek Gugatan Peradilan TUN. Putusan DKPP Tidak Dapat Ditafsir Berbeda Oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu”, *DKPP RI* (2022), diakses melalui <https://dkpp.go.id/keputusan-administratif-lembaga-yang-menindaklanjuti-putusan-dkpp-dapat-dijadikan-obyek-gugatan-peradilan-tun-putusan-dkpp-tidak-dapat-ditafsir-berbeda-oleh-presiden-kpu-dan-bawaslu/>, diakses pada 20 Mei 2025.